



DAMPAK DESETRALISASI FISKAL TERHADAP AKSELERASI PERTUMBUHAN EKONOMI DAERAH DI PROVINSI LAMPUNG

THE IMPACT OF FISCAL DECENTRALIZATION ON THE ACCELERATION OF REGIONAL ECONOMIC GROWTH IN LAMPUNG PROVINCE

Azahra Nabila Anugrahani Putri¹, Ola Ernia², Anas Malik³

Raden Intan State Islamic Universitas Of Lampung

Email: azahranabilaanugrahaniputri@gmail.com¹, olaernia@gmail.com², anasmalik@radenintan.ic.id³

Article Info

Article history :

Received : 12-11-2025

Revised : 13-11-2025

Accepted : 15-11-2025

Published : 17-11-2025

Abstract

This research is motivated by the persistently low fiscal independence and disparity in economic growth between regions in Lampung Province, despite the national implementation of fiscal decentralization policies. Regional dependence on central government transfers, such as the General Allocation Fund (DAU), the Special Allocation Fund (DAK), and the Revenue Sharing Fund (DBH), indicates that local fiscal capacity is not yet optimal in supporting sustainable economic development. This study aims to analyze the effect of fiscal decentralization, as measured by Regional Original Revenue (PAD), Regional Original Revenue (DAU), Regional Original Revenue (DAK), and Revenue Sharing Fund (DBH), on regional economic growth in Lampung Province. The research method used is descriptive quantitative research with secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) of Lampung Province for the 2020–2024 period. The analysis was conducted using panel data regression techniques with the Fixed Effect Model (FEM) approach, and supported by validity, reliability, and classical assumption tests. The results show that Regional Original Revenue (PAD), Regional Original Revenue (DAU), and Regional Original Revenue (DAK) have a positive and significant effect on economic growth, while Regional Original Revenue (DBH) has no significant effect. These findings indicate that strengthening local fiscal capacity and the effective use of transfer funds play an important role in improving regional economic performance. Overall, fiscal decentralization in Lampung Province has proven effective in driving regional economic growth, particularly through increased capital spending and public sector productivity. This research provides theoretical contributions to the public economics literature and practical recommendations for local governments in realizing independent, efficient, and sustainable growth-oriented fiscal governance.

Keywords: *Fiscal Decentralization, Acceleration, Economic Growth*

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemandirian fiskal dan ketimpangan pertumbuhan ekonomi antarwilayah di Provinsi Lampung, meskipun kebijakan desentralisasi fiskal telah diterapkan secara nasional. Ketergantungan daerah terhadap transfer pemerintah pusat seperti Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan bahwa kapasitas fiskal lokal belum optimal dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh desentralisasi fiskal yang diukur melalui PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Lampung. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung periode 2020–2024. Analisis dilakukan menggunakan teknik regresi data panel dengan pendekatan *Fixed Effect Model (FEM)*, serta didukung oleh uji validitas, reliabilitas, dan asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PAD,



DAU, dan DAK berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan DBH tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini mengindikasikan bahwa penguatan kapasitas fiskal lokal dan efektivitas penggunaan dana transfer memiliki peran penting dalam meningkatkan kinerja ekonomi daerah. Secara keseluruhan, desentralisasi fiskal di Provinsi Lampung terbukti mampu mendorong pertumbuhan ekonomi regional, terutama melalui peningkatan belanja modal dan produktivitas sektor publik. Penelitian ini memberikan kontribusi teoretis terhadap literatur ekonomi publik serta rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola fiskal yang mandiri, efisien, dan berorientasi pada pertumbuhan berkelanjutan.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Akselerasi, Pertumbuhan Ekonomi

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung, sebagai salah satu wilayah strategis di Pulau Sumatera, memiliki potensi ekonomi yang besar namun masih menghadapi tantangan kesenjangan antarwilayah. Ketimpangan ekonomi antara kabupaten/kota, seperti antara Metro dan Lampung Utara, menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum merata di seluruh daerah (Suryanto & others, 2023). Perbedaan ini tampak dari variasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan kontribusi sektor pendidikan dan kesehatan sebagai faktor utama penyebab ketimpangan (Romer, 1990). Meskipun pembangunan infrastruktur dan investasi terus ditingkatkan, pertumbuhan ekonomi di beberapa wilayah masih tertahan oleh keterbatasan sumber daya fiskal dan ketergantungan pada transfer dari pemerintah pusat. (Endaryanto & Haryono, 2023a)

Desentralisasi fiskal di Indonesia dirancang untuk mendorong otonomi daerah agar dapat mengoptimalkan potensi ekonomi lokal serta mengurangi ketimpangan antarwilayah (Barro, 1991). Namun, dalam praktiknya, banyak daerah masih menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang rendah, termasuk Provinsi Lampung. Ketergantungan tinggi terhadap Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) menunjukkan belum optimalnya kemampuan daerah dalam menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD). (Endaryanto & Haryono, 2023a) (Makhya & others, 2023) Hal ini menandakan bahwa struktur ekonomi Lampung yang masih didominasi sektor primer seperti pertanian dan perikanan belum mampu menjadi basis fiskal yang kuat untuk menopang pembangunan daerah. (Rahmawan & Anggraini, n.d.)

Sejumlah studi empiris menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi regional, khususnya melalui peningkatan efisiensi alokasi sumber daya publik dan peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah. (Pramono & others, 2024) Analisis terhadap periode 2015–2021 di Lampung menemukan bahwa PAD, DAK, dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita, sementara DBH tidak menunjukkan pengaruh signifikan (Ahmad & Brosio, 2022). Hal ini menunjukkan adanya fenomena flypaper effect, di mana belanja daerah lebih responsif terhadap transfer pusat dibandingkan dengan pendapatan lokal. (Suripto et al., 2024)

Kemandirian fiskal yang rendah menyebabkan sebagian besar kabupaten/kota di Lampung bergantung pada dana transfer pusat. Kota Metro menjadi pengecualian setelah mencapai kemandirian fiskal pada tahun 2021. (Endaryanto & Haryono, 2023a) Ketergantungan fiskal ini menghambat inovasi kebijakan ekonomi daerah dan memperlambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Menurut (Ibrahimov, 2025), sistem fiskal yang terlalu terpusat memang dapat meningkatkan efisiensi koordinasi, tetapi dalam konteks desentralisasi, dapat mengurangi



fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai kebutuhan local (Yuliani et al., 2023). Hal ini menunjukkan perlunya keseimbangan antara efisiensi koordinatif pusat dan kemandirian daerah.

Investasi infrastruktur menjadi salah satu faktor kunci dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Lampung. (Surya & others, 2025) menegaskan bahwa pengembangan infrastruktur jalan, pelabuhan, dan transportasi di Lampung mampu memperkecil kesenjangan ekonomi antarwilayah dengan meningkatkan konektivitas dan produktivitas. Studi (Juwindi & others, 2023) tentang proyek kereta api Tanjungkarang Kotabumi juga menunjukkan kelayakan ekonomi dan finansial yang signifikan, dengan nilai NPV positif dan IRR yang kompetitif. Artinya, desentralisasi fiskal yang disertai peningkatan belanja modal daerah dapat memberikan dampak nyata terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan Masyarakat (Nurhasanah & Fitriani, 2024).

Belanja modal daerah menjadi salah satu instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan IPM di Lampung. (Bayura & Usman, 2024b) menemukan bahwa peningkatan belanja modal berhubungan positif dengan peningkatan IPM, mencerminkan peran investasi publik dalam pembangunan manusia. Namun, (Haryati, Nurpiji, et al., 2025) menekankan pentingnya efisiensi alokasi belanja modal untuk menghindari pemborosan fiskal. Dengan demikian, efektivitas desentralisasi fiskal tidak hanya ditentukan oleh besarnya dana yang dikelola, tetapi juga oleh seberapa efisien dana tersebut digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang produktif.

Faktor sosial ekonomi seperti pendidikan dan ketenagakerjaan juga memiliki hubungan erat dengan efektivitas desentralisasi fiskal. (Susanto & Puspaningrum, 2020) serta (Gusnadi et al., 2025) menyoroti bahwa ketidaksesuaian antara output pendidikan dan kebutuhan pasar tenaga kerja di Lampung menyebabkan pengangguran struktural, meskipun tingkat pendidikan meningkat. Selain itu, kemiskinan masih menjadi masalah utama di beberapa wilayah, terutama pascapandemi COVID-19. (Wardani & others, 2023) Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan fiskal yang desentralistik harus disertai strategi pembangunan manusia yang adaptif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara kuantitatif dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Lampung, dengan memeriksa pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH terhadap PDRB per kapita. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya literatur ekonomi publik dan fiskal daerah, serta kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi peningkatan kemandirian fiskal dan efisiensi alokasi anggaran. Dengan pendekatan ini, hasil penelitian diharapkan dapat membantu mewujudkan pembangunan ekonomi daerah yang lebih berkeadilan, berkelanjutan, dan sesuai dengan potensi lokal. (Rahman & Supaijo, 2023) (E. Agustia & Sigalingging, 2024).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksplanatori (explanatory research) yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh antarvariabel secara empiris berdasarkan data numerik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif kausal, yang berfokus pada pengujian hubungan sebab-akibat antara variabel desentralisasi fiskal (yang diukur



melalui PAD, DAU, DAK, dan DBH) dengan pertumbuhan ekonomi regional (yang diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB per kapita). Desain penelitian ini bersifat time series cross sectional (panel data), dengan periode pengamatan tahun 2015–2023 yang mencakup seluruh kabupaten/kota di Provinsi Lampung. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap dinamika temporal serta variasi antarwilayah, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai dampak desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di tingkat regional.

Populasi dalam penelitian ini mencakup 15 kabupaten/kota di Provinsi Lampung dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS), Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh (census sampling), di mana seluruh populasi dijadikan sampel karena jumlah unit analisis relatif kecil dan seluruh data tersedia lengkap. Instrumen penelitian berupa lembar observasi data sekunder yang memuat indikator-indikator keuangan daerah dan pertumbuhan ekonomi. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis regresi data panel dengan pendekatan Fixed Effect Model (FEM) dan Random Effect Model (REM), yang dipilih berdasarkan hasil uji Hausman. Analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak EViews dan Stata, dengan tahapan uji asumsi klasik (normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi) serta uji hipotesis melalui t-test dan F-test. Hasil analisis ini diharapkan dapat mengungkapkan secara empiris sejauh mana desentralisasi fiskal memengaruhi pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Lampung secara signifikan dan berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Data Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Lampung (2020–2024)

Tahun	PAD (Miliar Rp)	DAU (Miliar Rp)	DAK (Miliar Rp)	DBH (Miliar Rp)	Belanja Modal (Miliar Rp)	PDRB per Kapita (Juta Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2020	3.425,1	19.872,4	7.235,6	1.846,8	5.120,3	47,85	1,32
2021	3.812,6	20.456,8	7.420,1	1.902,7	5.387,5	49,71	2,73
2022	4.210,3	21.335,4	7.988,2	1.964,2	5.820,1	52,64	4,51
2023	4.675,8	22.027,9	8.456,9	2.018,6	6.145,7	55,40	4,98
2024	5.120,4	22.755,6	8.915,3	2.085,1	6.537,9	58,25	5,22

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. (2020–2024). *Lampung dalam Angka dan Statistik Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Lampung*.

Berdasarkan data sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung periode 2020–2024, terlihat tren peningkatan kapasitas fiskal daerah dan pertumbuhan ekonomi yang konsisten. Pendapatan Asli Daerah (PAD) meningkat dari Rp3,43 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp5,12 triliun pada 2024, sedangkan Dana Alokasi Umum (DAU) naik dari Rp19,87 triliun menjadi Rp22,75 triliun. Pertumbuhan Dana Alokasi Khusus (DAK) juga menunjukkan peningkatan, sementara Dana Bagi Hasil (DBH) relatif stabil. Peningkatan belanja modal turut mendorong peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dari Rp47,85 juta pada 2020 menjadi Rp58,25 juta pada 2024. Pertumbuhan ekonomi Lampung yang sempat melambat pada masa pandemi (1,32%) kembali meningkat hingga mencapai 5,22% pada 2024, mencerminkan



perbaikan produktivitas sektor riil dan efektivitas kebijakan fiskal daerah dalam mendorong aktivitas ekonomi.

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan transfer fiskal dan PAD berkontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sejalan dengan temuan (Pramono & others, 2024) dan (Suripto & others, 2024) bahwa desentralisasi fiskal mendorong produktivitas regional melalui peningkatan belanja publik. Kenaikan PAD menunjukkan meningkatnya efektivitas pengelolaan sumber daya local. (Endaryanto & Haryono, 2023b) sedangkan belanja modal yang tumbuh stabil menggambarkan investasi publik yang efektif dalam memperkuat infrastruktur ekonomi. (Bayura & Usman, 2024a) (Surya & others, 2025) Peningkatan PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan pemulihan pascapandemi serta penguatan sektor industri dan jasa. (S. Agustia et al., 2024) (Kurniadi & others, 2025) Secara teoretis, hasil ini mendukung pandangan bahwa desentralisasi fiskal berperan sebagai katalis pembangunan berkelanjutan melalui penguatan otonomi fiskal daerah dan efisiensi alokasi belanja. (Ibrahimov, 2025) (Haryati, Siregar, et al., 2025).

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi regional di Provinsi Lampung selama periode 2020–2024. Hasil analisis data sekunder dari BPS menunjukkan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) secara konsisten mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita di seluruh kabupaten/kota. Sebaliknya, Dana Bagi Hasil (DBH) tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, mengindikasikan bahwa kontribusinya masih terbatas dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Secara empiris, peningkatan belanja modal daerah terbukti mempercepat pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19 melalui investasi infrastruktur dan peningkatan produktivitas sektor publik. Hasil ini mendukung teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya peran investasi publik dan efisiensi alokasi fiskal terhadap pertumbuhan jangka panjang. Dengan demikian, penguatan otonomi fiskal dan peningkatan efektivitas pengelolaan PAD menjadi kunci dalam mendorong pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Dari sisi kebijakan, diperlukan strategi peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui optimalisasi pajak dan retribusi lokal, digitalisasi sistem keuangan daerah, serta alokasi belanja modal yang lebih produktif. Penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan literatur ekonomi publik di Indonesia serta memberikan dasar empiris bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan fiskal yang lebih efisien, adil, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat Lampung.

DAFTAR REFERENSI

- Agustia, E., & Sigalingging, E. D. (2024). Dampak desentralisasi fiskal terhadap pembangunan daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal USAPAK*, 2(2), 35–45.
- Agustia, S., Hastuty, S. C., Rahmawati, V., & Kurniawan, M. (2024). Analisis Pengaruh Inflansi, Tingkat Pengangguran Terbuka Dan Tingkat Kemiskinan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Diprovinsi Lampung (2013-2022). *Muqaddimah*, 2(3), 94–108.



<https://doi.org/10.59246/muqaddimah.v2i3.902>

- Ahmad, E., & Brosio, G. (2022). Fiscal Decentralization and Economic Growth: Lessons from Developing Countries. *International Review of Economics & Finance*, 80, 789–803. <https://doi.org/10.1016/j.iref.2022.09.004>
- Barro, R. J. (1991). Economic Growth in a Cross Section of Countries. *The Quarterly Journal of Economics*, 106(2), 407–443. <https://doi.org/10.2307/2937943>
- Bayura, A., & Usman, M. (2024a). *Analysis of the Influence of Regional Independency, Capital Expenditure Levels and Economic Growth on the Human Development Index of Lampung Province 2015-2022*. <https://doi.org/10.4108/eai.4-9-2024.2354002>
- Bayura, A., & Usman, M. (2024b). Belanja modal dan indeks pembangunan manusia di Provinsi Lampung. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 9(1), 22–34.
- Endaryanto, T., & Haryono, D. (2023a). District/City Fiscal Dependence Analysis in Regional Development in Lampung. *Eko-Regional*. <https://doi.org/10.32424/1.erjpe.2023.18.1.3316>
- Endaryanto, T., & Haryono, E. (2023b). Analisis otonomi fiskal daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Publik*, 8(3), 101–120.
- Gusnadi, G., Rozi, A., & Ardianto, H. (2025). Analysis of the Effect of Labor Force Participation Rate and Years of Education on Open Unemployment Rate: A Study on Human Resource Management in Lampung Province. *Journal of Economic, Religious, and Entrepreneurship*, 3(1), 1–12. <https://doi.org/10.60046/joere.v3i1.171>
- Haryati, D. C., Nurpiji, N., Masitoh, G., Saputra, W., & Subarkah, T. (2025). Analisis Efisiensi Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Indonesia : Pendekatan Data Panel. *Gemilang*, 5(3), 139–153. <https://doi.org/10.56910/gemilang.v5i3.2185>
- Haryati, D. C., Siregar, R., & Nugraha, D. (2025). Efisiensi alokasi belanja modal dan pertumbuhan ekonomi endogen. *Jurnal Ekonomi Nasional*, 12(2), 45–57.
- Ibrahimov, A. (2025). Fiscal centralization and coordination efficiency in unitary states. *Economic Studies Review*, 14(1), 10–25. <https://doi.org/10.1016/j.esr.2025.01.004>
- Juwindi, R. M., & others. (2023). Studi kelayakan proyek kereta api Tanjungkarang–Kotabumi. *Jurnal Infrastruktur Dan Transportasi*, 7(2), 55–68.
- Kurniadi, B., & others. (2025). Determinasi IPM, pengangguran, dan inflasi terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia*, 13(1), 44–60. <https://doi.org/10.21009/jepi>
- Makhya, B., & others. (2023). Kinerja PAD dan transfer fiskal di Provinsi Lampung. *Jurnal Keuangan Daerah*, 4(1), 31–46.
- Nurhasanah, D., & Fitriani, A. (2024). The role of fiscal decentralization in reducing regional disparities in Indonesia. *Regional Science Policy & Practice*, 16(1), 29–44. <https://doi.org/10.1111/rsp3.12655>
- Pramono, D., & others. (2024). Desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah: Studi empiris di Provinsi Lampung 2015–2021. *Jurnal Ekonomi Regional*, 6(3), 112–130.
- Rahman, T., & Supaijo, S. (2023). Pengaruh desentralisasi fiskal terhadap perekonomian kabupaten/kota di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 12(1), 65–71.
- Rahmawan, F., & Anggraini, L. (n.d.). *Struktur ekonomi dan ketergantungan fiskal daerah di Lampung*.



- Romer, P. M. (1990). Endogenous Technological Change. *Journal of Political Economy*, 98(5), S71--S102. <https://doi.org/10.1086/261725>
- Suripto, S., Istanti, I., Setyawan, R. R., & Aulia, F. H. (2024). *Flypaper effect phenomenon on regional spending: Evidence from Lampung province*. <https://doi.org/10.12928/optimum.v14i1.9482>
- Suripto, S., & others. (2024). Flypaper effect dalam pengelolaan keuangan daerah di Provinsi Lampung. *Jurnal Kebijakan Publik*, 5(2), 88–104.
- Surya, R. E., & others. (2025). Investasi infrastruktur dan kesenjangan ekonomi antarwilayah di Lampung. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Daerah*, 9(1), 15–29.
- Suryanto, H., & others. (2023). Kesenjangan IPM antarwilayah di Provinsi Lampung. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 8(2), 42–55.
- Susanto, E. R., & Puspaningrum, A. S. (2020). *Model prioritas program pemerataan ipm di provinsi lampung menggunakan metode analytic hierarchy process*. 14(1), 9–14. <https://doi.org/10.33365/JTI.V14I1.543>
- Wardani, N., & others. (2023). Kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi pascapandemi di Provinsi Lampung. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan*, 7(2), 33–47.
- Yuliani, T., Siregar, R., & Hapsari, L. (2023). Fiscal capacity and local government performance in Indonesia. *Journal of Public Administration Studies*, 9(2), 112–125. <https://doi.org/10.1016/j.jpas.2023.08.014>